

## E. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan Para Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan. Secara bertahap dan berkesinambungan, Direksi, Dewan Komisaris dan segenap karyawan Bank Amar Indonesia (Bank) telah melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai suatu komitmen sekaligus menjadi upaya konkret bersama untuk memperkuat struktur organisasi Bank yang berlandaskan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan keyakinan bahwa dengan peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, kemandirian dan kewajaran membuat Bank memiliki daya saing yang kuat. Oleh karena itu Bank akan senantiasa berusaha menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana ketentuan yang berlaku agar dapat mendukung tujuan bisnis, pertumbuhan usaha, profitabilitas dan memberikan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan, disamping dapat meningkatkan kemampuan agar kelangsungan usaha dalam jangka panjang dapat dicapai

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam berorganisasi, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diseluruh organ Bank diharapkan akan menciptakan fondasi yang kuat dan stabil bagi Bank dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan serta menjaga kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan, sekaligus menjadi faktor pendorong (*trigger*) bagi Bank untuk mencapai kinerja jangka panjang yang positif serta berkesinambungan menuju tercapainya visi Bank sebagai Bank yang Solid, Sehat dan Modern.

Selama tahun 2016 dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern yang handal secara bertahap, Bank telah memenuhi kecukupan kebijakan Bank dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru serta melakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ada. Sebagai pendukungnya, Bank juga telah melakukan proses rekrutment pegawai, pengembangan dibidang IT dan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan (baik *in House Training* maupun *Ex House Training*), seminar maupun *workshop*.

## TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

#### 1.1 Jumlah, komposisi, kriteria serta independensi anggota Direksi

Jumlah Direksi Bank sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagian besar anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank, dan telah disetujui melalui uji kelayakan dan kepatutan .

#### Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Tuk Yulianto	Direktur Utama
I N Mawa	Direktur Kepatuhan
Vishal Tulsian	Direktur Bisnis

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite dan Satuan kerja antara lain :

- Komite Asset Liability Committee (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kredit
- Komite Personalia
- Komite Pengarah Tehnologi Informasi
- Satuan Kerja SKAI
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Satuan Kerja Manajemen Risiko

## 1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas pokok sebagai berikut:
  - Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
  - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank untuk kepentingan Bank
  - Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang;
3. Tugas dan tanggung jawab kepengurusan sesuai dalam butir 1 dan 2 diatas wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
6. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
7. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
9. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2016 tentang Remunerasi dan Nominasi Bank Umum, menyusun Kebijakan Remunerasi yang paling sedikit memuat :
  - Skala Remunerasi berdasarkan tingkatan dan jabatan
  - Metode dan mekanisme penetapan Remunerasi

10. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit External, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
11. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
12. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
13. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
14. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Anggota Direksi.
15. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Memastikan Satuan Kerja dan Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
17. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank

### 1.3 Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Pemegang saham dan/atau lembaga lain.

### 1.4 Rapat Direksi dan Rekomendasi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Rapat Direksi diselenggarakan minimum 1 (satu) kali / bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Selama periode laporan Tahun 2016 telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi dengan perincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Kehadiran Fisik	Teleconference	
Tuk Yulianto	Direktur Utama	12	12	0	100%
I N Mawa	Direktur Kepatuhan	12	12	0	100%
Vishal Tulsian	Direktur Bisnis	12	6	6	100%

Agenda Rapat Direksi Tahun 2016

## Agenda Rapat Direksi Tahun 2016

No	Tanggal	Agenda
1	8 Januari 2016	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II - 2015
2	23 Pebruari 2016	Follow up Rapat PT Bank Amar Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Februari 2016
3	28 Maret 2016	Tindak Lanjut hasil Rapat "Prudential Meeting dan Evaluasi Produk Kredit Personal Multiguna "Tunaiku"
4	21 April 2016	Evaluasi Perkreditan
5	8 Mei 2016	Kinerja Kantor Cabang dan Capem
6	30 Juni 2016	Evaluasi Kinerja Bank
7	14 Juli 2016	Persiapan menjelang pemeriksaan OJK dan Penanganan Kredit
8	5 Agustus 2016	Evaluasi Kinerja Bank bulan juli 2016
9	9 September 2016	Evaluasi kinerja Bank bulan Agustus 2016
10	12 Oktober 2016	Koordinasi Kinerja Bank dengan Unit Bisnis dan Risiko
11	8 Nopember 2016	Koordinasi Pembahasan Hasil Exit Meeting OJK
12	23 Desember 2016	Koordinasi Kinerja Bank dan input masing-masing Divisi

### B. Jumlah, komposisi, kriteria serta independensi Dewan Komisaris

#### 2.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria Serta Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebanyak 2 (dua) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dan telah disetujui OJK melalui uji kelayakan dan kepatutan.

#### Susunan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Bernard RKK Tan
Komisaris Independen	Drs.Ec. Bastian Purnama*)
Komisaris Independen	Drs.Ec. Gindo Tampubolon,Ak

Catatan: \*) Pada tanggal 17 Nopember 2016, Sdr.Drs.Ec. Bastian Purnama mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen, sehingga Susunan Komisaris saat menjadi:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Bernard RKK Tan
Komisaris Independen	Drs.Ec. Gindo Tampubolon,Ak

Untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Komisaris, Bank telah mengajukan calon Komisaris Independen kepada OJK sesuai surat No.510/DIR/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 untuk dilakukan penilaian *fit and proper test* terhadap 1 (satu) orang calon anggota Komisaris dan saat ini sedang dalam proses menunggu hasil penilaian atas *fit and proper test* tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

## 2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan Bank, sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 55/DIR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Revisi) PT.Bank Amar Indonesia ditetapkan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/ jenjang organisasi.
2. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala/ sewaktu waktu, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
  - a. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait,
  - b. Penyediaan dana besar (*large exposure*)
  - c. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ Peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan/ perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
8. Membentuk :
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Memastikan komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
11. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan
12. Pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
13. Evaluasi secara berkala atas Kebijakan Remunerasi.
14. Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Selama tahun 2016 , Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016 -2018
2. Realisasi dan Pencapaian Target RBB Tahun 2016
3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
4. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
5. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

## 6. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

## 2.3 Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Pemegang saham dan/atau lembaga lain

## 2.4 Rangkap dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah melakukan 5 (lima) kali Rapat, hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
Bernard RKK Tan	5	5	0	100%
Drs.Ec. Bastian Purnama	5	4	0	80%
Drs.Ec. Gindo Tampubolon,Ak	5	5	0	100%

## Agenda Rapat Dewan Komisaris 2016

No	Tanggal	Agenda
1	10 Pebruari 2016	Evaluasi Kinerja Bank Tahun 2015 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016 - 2018
2	29 Juni 2016	1. Evaluasi Kinerja Bank Triwulan I - 2016 2. Evaluasi Risk Based Bank Rating (RBRR) 3. Rencana Strategis Bank 2016 – 2018 (revisi)
3	1 Agustus 2016	Evaluasi Kinerja Bank Triwulan II - 2016
4	18 Nopember 2016	Evaluasi Kinerja Bank Triwulan III -2016. Evaluasi Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2016.
5	19 Desember 2016	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan GCG



## B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE- KOMITE

### 1. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / Satuan Kerja dibawah Direksi

#### a. Komite *Asset Liability Committee* (ALCO)

Komite Manajemen Dana atau *Asset Liability Committee* (ALCO) bertanggung jawab atas penentuan arah kebijakan dan strategi asset dan kewajiban Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan. ALCO melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan dana pihak ketiga dan kredit Bank.

#### b. Komite Manajemen Risiko

Komite ini bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Komite Manajemen Risiko bertugas menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan Bank ke depan. Dengan adanya Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Bank secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha. Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat secara berkala, namun tidak terbatas pada pembahasan Profil Risiko Bank.

#### c. Komite Kredit

Komite Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit beranggotakan Direksi dan Pejabat yang terkait dan melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka proses persetujuan kredit

#### d. Komite Personalia

Komite ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait dengan remunerasi karyawan, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan karyawan, sistem performance appraisal, peningkatan disiplin dan moral kerja karyawan, pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk menghindari kejenuhan, peningkatan produktivitas dan proses alih pengetahuan/ketrampilan (*transfer knowledge*). Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat sesuai kebutuhan.

#### e. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite ini bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha; kesesuaian proyek-proyek TI baik dengan rencana strategis, kebutuhan sistem

informasi manajemen maupun kegiatan usaha Bank; efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI; pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya; upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI; dan lain-lain. Komite yang beranggotakan anggota Direksi yang membawahi TI dan manajemen risiko serta pejabat yang terkait dengan penyelenggara TI dan pengguna TI, melakukan secara berkala.

**f. Satuan Kerja SKAI**

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank. Satuan kerja Audit Intern (SKAI) merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya check and balance. Peran dan fungsi SKAI senantiasa ditingkatkan dalam upaya untuk memberikan masukan yang lebih strategis dalam pengelolaan aktivitas operasional perbankan. Peningkatan peranan SKAI selain diarahkan untuk mengawasi risk asset Bank dan penerapan pengawasan berbasis risiko (risk base supervision) tetapi juga diharapkan sebagai early warning signals bagi manajemen berupa masukan-masukan khususnya dalam mengamankan aset perusahaan serta meningkatkan kecukupan dan efektivitas internal kontrol.

**g. Satuan Kerja Kepatuhan**

Satuan Kerja Kepatuhan (compliance unit) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

**h. Satuan Kerja Manajemen Risiko**

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko).

Satuan kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan

## 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dibawah Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.39/SK-DIR/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite, yaitu:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko;
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal :

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

### 1. Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, 2 (orang) orang Pihak Independen, 1 orang yang ahli di bidang keuangan dan/atau Akuntansi dan 1 orang yang ahli dibidang Hukum dan/atau Perbankan. Sejak tanggal 17 Nopember 2016, Ketua Komite Audit kosong disebabkan karena Sdr.Drs.Ec.Bastian Purnama mengundurkan diri dan saat ini Ketua Komite Audit dirangkap oleh Sdr.Drs.Ec.Gindo Tampubolon, Ak merangkap sebagai ketua Komite Pemantau Risiko.

Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan tugas pokok meyakini

struktur pengendalian Bank telah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan hasil temuan Komite Audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

**a. Susunan Keanggotaan Komite Audit**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Drs.Gindo Tampubolon,AK	Komisaris Independen
Anggota	Dr.Syahrir Majidi, MM Yustin Malau,SH.,MH	Pihak Independen

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan BI/OJK serta Pemeriksa ekstern lainnya.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank.

**c. Rapat Komite Audit**

Sepanjang tahun 2016 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dihadiri oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
Drs. Ec. Bastian Purnama	12	11	0	91%
Dr. Syahrir Majidi, MM	12	12	0	80%
Yustin Malau, SH.,MH	12	2	0	100%

## Agenda Rapat Komite Audit 2016

No	Tanggal	Agenda
1	25 Januari 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern bulan Des 2016
2	12 Pebruari 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Bulan Januari 2016 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan OJK tahun 2015.
3	17 Maret 2016	Evaluasi Hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern bulan Feb 2016 Evaluasi Laporan Pokok-Pokok hasil Audit semester II/2015
4	21 April 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Bulan Maret 2016
5	18 Mei 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Security Audit dan Pemeriksaan Intern BI RTGS Bulan April 2016 Evaluasi Hasil Pemeriksaan Tehnologi Informasi
6	23 Juni 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Bulan Mei 2016
7	25 Juli 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern bulan Juni 2016
8	16 Agustus 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Bulan Juli 2016 Evaluasi Laporan Pokok-Pokok hasil Audit Intern semester I / 2016
9	23 September 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Intern Posisi Bulan Agustus 2016
10	14 Oktober 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Bulan Sept 2016 Evaluasi Hasil Pemeriksaan OJK 2016
11	10 Nopember 2016	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern, security audit dan pemeriksaan Intern BI-SKNBI bulan Okt 2016 Evaluasi Hasil Pemerisaan Tehnologi Informasi
12	22 Desember 2016	Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern bulan Nopember 2016

## 2. Komite Pemantau Resiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang, diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (orang) orang Pihak Independen yang ahli di bidang ekonomi, keuangan dan/atau Perbankan dan 1 (orang) Pihak Independen yang ahli dibidang manajemen risiko. Dengan jumlah anggota 2 (dua) orang, maka hal ini belum sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 3 orang.

**a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Resiko**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Drs.Gindo Tampubolon,AK	Komisaris Independen
Anggota	Dr.Syahrir Majidi, MM Vacant	Pihak Independen

Keterangan: Kekosongan 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko saat ini sedang dalam proses seleksi

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Resiko**

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan Bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko
4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Memberi masukan kepada Dewan komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.

**c. Rapat Komite Audit**

Sepanjang tahun 2016 Komite Pemantau Resiko mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dihadiri oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
Drs. Ec. Bastian Purnama	12	12	0	100%
Dr. Syahrir Majidi, MM	12	12	0	80%

## Agenda Rapat Komite Pemantau Resiko Tahun 2016

No	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2016	Perkembangan Kredit Personal Multiguna Tunaiku Mitigasi atas risiko yang terjadi, Kredit Pesonal Multiguna Tunaiku
2	23 Februari 2016	Perkembangan Kredit Personal Multiguna
3	15 Maret 2016	Perkembangan Kredit Personal Multiguna dan SME
4	12 April 2016	Perkembangan Kredit <i>Secure</i>
5	16 Mei 2016	Perkembangan Kredit <i>Secure</i> dan <i>Unsecure</i> dari sisi NPL
6	16 Juni 2016	Evaluasi Kredit posisi Mei 2016
7	18 Juli 2016	Evaluasi Kredit dan NPL bulan Juni 2016
8	09 Agustus 2016	Perkembangan Kredit secara keseluruhan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Action Plan jangka pendek</li> <li>• Evaluasi terhadap Kredit a/n Agus Liantono</li> <li>• SOP untuk write off</li> </ul>
9	19 September 2016	Tindak lanjut hasil pertemuan RUPS Juni 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi diminta memberikan penjelasan kepada Komisaris perihal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Tahun 2015</li> <li>• Rencana Kerja Audit 2016</li> </ul> </li> <li>• Perbandingan RBB Revisi dengan Realisasi Bulan Juni – Agustus 2016</li> </ul>
10	21 Oktober 2016	Tindak Lanjut Surat OJK No.S-495/KR041/2016 RBB 2017 - 2019
11	10 Nopember 2016	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Posisi Juli 2016
12	06 Desember 2016	Pembahasan Debitur PT.Elektronik Mark Maju Bersama

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai anggota yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai yang diwakili oleh Pejabat Eksekutif Bank.

#### a. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Drs. Ec. Bastian Purnama	Komisaris Independen
Anggota	Drs.Ec. Gindo Tampubolon, Ak Toto Warsoko Pikir,Drs.M.Si.AK	Pihak Independen Pejabat Eksekutif

Catatan : pada 17 Nopember 2016 Bastian Purnama mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
6. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.



### c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2016 Komite Pemantau Resiko mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dihadiri oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
<b>Drs.Ec. Bastian Purnama</b>	12	11	0	91%
<b>Drs.Ec. Gindo Tampubolon, Ak</b>	12	12	0	100%
<b>Toto Warsoko Pikir, Drs, M.Si. AK</b>	12	12	0	100%

### Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016

No	Tanggal	Agenda
1	12 Januari 2016	UMK
2	12 Pebruari 2016	Pembahasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
3	16 Maret 2016	Evaluasi penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
4	21 April 2016	Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Agustus 2015  Rekomendasi untuk Perpanjangan masa jabatan menunjuk memo Direksi No.009/MI-DIR/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdr. Bernard RKK Tan sebagai Komisaris Utama</li> <li>• Sdr. Tuk Yulianto sebagai Direktur Utama</li> <li>• Sdr. Vishal Tulsian sebagai Direktur Bisnis</li> </ul>
5	17 Mei 2016	Evaluasi posisi vacant Evaluasi rencana pemberian THR
6	14 Juni 2016	Evaluasi pelaksanaan rekrutmen SDM Evaluasi pelaksanaan THR
7	20 Juli 2016	Evaluasi Biaya Pendidikan Semester 1-2016

No	Tanggal	Agenda
8	16 Agustus 2016	Pembahasan Peraturan Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui usulan perubahan/revisi Peraturan Perusahaan</li> <li>• Mengesahkan Ke Depnaker</li> <li>• Mengadakan sosialisasi kepada seluruh Pegawai</li> </ul>
9	15 September 2016	Monitoring pemeriksaan OJK bidang SDM
10	19 Oktober 2016	Monitoring tindak lanjut pemeriksaan OJK bidang SDM
11	10 Nopember 2016	Hasil Pemeriksaan OJK Posisi Juli 2016 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporate Plan 2015 – 2019 pada Rencana Jangka Pendek 2015 belum terpenuhi</li> <li>• Bank wajib menyusun kebijakan tentang Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang disampaikan OJK paling lambat Desember 2016</li> <li>• Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Bank.</li> <li>• Bank wajib memenuhi posisi yang vacant dalam struktur organisasi</li> </ul>
12	28 Nopember 2016	Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Pengangkatan Calon Direktur Utama

## C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

### a. Fungsi Kepatuhan

Bank telah membentuk Divisi Kepatuhan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan, serta menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahahi fungsi kepatuhan. Divisi Kepatuhan dibentuk secara independen terpisah dengan unit kerja operasional

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2016 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh

OJK/Bank Indonesia baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka Divisi Kepatuhan telah melakukan berbagai upaya :

1. Melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan terkait adanya Laporan yang mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali sehingga dikenakan denda oleh Otoritas, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali.
2. Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Peraturan OJK/Bank Indonesia, maupun Otoritas lainnya, maka Divisi Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
3. Menyampaikan laporan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh Direktur/Divisi Kepatuhan.
4. Memantau, menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan melakukan koordinasi dengan Direksi dan unit kerja terkait.
5. Memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pengujian.
6. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
7. Penerapan Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## **b. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank dilakukan oleh Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

SKAI setiap tahunnya telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan sebagai pedoman melaksanakan pemeriksaan/audit intern Bank.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh SKAI telah mencakup seluruh aktivitas Bank, dimulai dari unit operasional (Kantor Cabang, dan Kantor Capem ) serta Kantor Pusat.

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI tahunan meliputi :

### **1. Audit / Pemeriksaan Umum**

- Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) yang telah ditetapkan;
- Ditetapkan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profil risiko (*Risk Based Audit*)

## 2. Audit / Pemeriksaan Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari :

- Hasil temuan audit umum yang memerlukan penelitian khusus;
- Hasil temuan pemeriksa eksternal yang perlu ditindak lanjuti;

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI diberikan wewenang untuk melakukan akses terhadap setiap sumber informasi yang dibutuhkan SKAI dan dapat mengkomunikasikan laporannya pada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan bahwa hasil temuan audit telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Selain melakukan monitoring terhadap hasil temuan pemeriksaannya, SKAI juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekomendasi serta tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan ekstern telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *time line* yang telah disepakati.

Laporan Hasil Audit secara berkala disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada :

- Direktur Kepatuhan
- Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada OJK. Bank secara bertahap telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hasil audit internal, melalui peningkatan kompetensi auditornya, terutama kompetensi auditor dibidang Teknologi Informasi maupun melalui pemenuhan sarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

### c. Fungsi Audit Ekstern

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank Tahun Buku 2016, Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) yang terdaftar di OJK/Bank Indonesia dengan *Business License* No. 1423/KM.1/2012. KAP telah menyampaikan "Laporan *Final Audit Report* dan *Management Letter*" kepada OJK secara tepat waktu telah disampaikan tanggal 21 April 2017 perihal Penyampaian Laporan *Final Audit Report* dan *Management Letter*. Dalam melakukan

pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Akta No 9 tanggal 5 Mei 2016 dan atas rekomendasi Komite Audit maka untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2017, PT Bank Amar Indonesia menunjuk KAP Osman Bing & Eny (Deloitte) untuk melaksanakan audit laporan keuangan tahun buku 2017 dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Osman Bing & Eny adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 2015 dan 2016 serta memiliki kredibilitas dan reputasi internasional yang terpercaya.

#### **D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Manajemen Risiko diterapkan secara komprehensif terhadap 8 (delapan) risiko yang wajib dikelola oleh Bank, yaitu :risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

##### **Penerapan manajemen risiko mencakup :**

- a. Pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

Bank memiliki Struktur Organisasi yang memadai dan menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari seluruh jenjang Organisasi perusahaan. Struktur Organisasi tersebut telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*) dengan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). Meskipun demikian tanggung jawab akhir atas pengelolaan risiko ada pada masing-masing unit kerja selaku *risk owner* dari aktivitas operasional yang dijalankan.

Bank memiliki komite-komite yang berperan mendorong penerapan manajemen risiko secara efektif yaitu Komite Manajemen Risiko dibawah Direksi dan Komite Pemantau Risiko dibawah Dewan Komisaris.

Adapun wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya Penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi / eksposur risiko melampaui limit yang telah ditetapkan

Hasil penilaian Profil Risiko dalam Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Profil Risiko	Predikat
1	Triwulan I	<i>Low to Moderate</i>
2	Triwulan II	<i>Moderate</i>
3	Triwulan III	<i>Moderate</i>
4	Triwulan IV	<i>Moderate</i>

Hasil penilaian Risiko Komposit Bank periode Desember 2016 (Triwulan IV) adalah *inherent* secara komposit pada peringkat *moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit pada peringkat *Fair* sehingga peringkat risiko secara agregat adalah *Moderate* dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Risiko	Predikat
1	Risiko Kredit	<i>Moderate to High</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>

No	Jenis Resiko	Predikat
4	Risiko Operasional	<i>Moderate to High</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>
6	Risiko Stratejik	<i>Moderate</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>
8	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>

Pengembangan Budaya Manajemen Risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

Secara bertahap Bank telah membangun sistem informasi manajemen yang memadai, mengingat saat ini Bank belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dan menghasilkan laporan yang ter *update*

Bank senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan *risk control system* yang baik, mendeteksi timbulnya penyimpangan/*fraud* secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), sedangkan fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

#### **E. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)**

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sepanjang tahun 2016 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun debitur individu dan group di Bank Amar Indonesia selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	<b>Pihak Terkait</b>	2	420

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
	<b>Debitur Inti</b>		175.435
2	• Individu	10	
	• Group	-	

## F. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Bank berencana menjadi Bank BUKU II pada akhir tahun 2018. Untuk mencapai target ini, Bank harus meningkatkan permodalan dan skala operasi Bank dengan peningkatan dalam pinjaman yang diberikan kepada

debitur dan penggalangan Dana Pihak Ketiga. Untuk menunjang pertumbuhan tersebut, Bank akan meningkatkan efisiensi proses dan infrastruktur teknologi informasi.

### 1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang yaitu untuk melanjutkan pengembangan permodalan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia demi mencapai Visi Bank sebagai Bank yang Solid, Sehat dan Modern.

### 2. Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 - 2019 meliputi target jangka pendek dan jangka menengah.

#### • Target Jangka Pendek (Tahun 2017)

- Berkaitan dengan jaringan Kantor, Bank merencanakan untuk melakukan relokasi Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta pada awal tahun 2017, disamping itu Bank berencana untuk



menambah dan memperluas jaringan kantor dengan menambah 1 (satu) Kantor Kas di Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

- Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang *financial inclusion*, dengan melihat tingginya permintaan pasar (*market*) dan cukup banyaknya jumlah aplikasi pengajuan pinjaman Kredit Personal Multiguna "Tunaiku" yang belum tersentuh oleh industri perbankan, maka Bank berencana untuk terus mengembangkan pelaksanaan kredit Tunaiku dengan memperluas jangkauan atas produk Kredit Personal Multiguna "Tunaiku" baik untuk sektor konsumtif maupun untuk sektor produktif.
- Beberapa inisiatif yang telah direncanakan oleh Bank untuk dijajaki dan dikembangkan selama tahun 2017 adalah kerjasama dengan *e-commerce*, intitusi *fintech lending*, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Telekomunikasi dan beberapa kerjasama dengan komunitas (*channel*) lainnya. Lebih lanjut, Bank berencana memperluas aksesibilitas terhadap produk dan layanan Bank dengan melakukan investasi dan pengembangan pada Teknologi Informasi, salah satunya adalah Bank akan mengeksplorasi (penjajakan) dan menerbitkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK – Kartu Debit dan Kartu ATM), serta *Digital/Electronic Signature* di tahun 2017.
- Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mendukung setiap inisiatif serta pertumbuhan yang telah direncanakan, Bank akan menambah kuantitas dan kualitas pegawai, serta adanya dukungan sistem internal yang solid (HRIS – *Human Resources Internal System*), terkait dengan rencana SDM pada tahun 2017.

- **Target Jangka Menengah – Tahun 2018 – 2019**

Sesuai dengan visi Bank untuk menjadi Bank yang Modern, Bank akan senantiasa melakukan investasi dan pengembangan pada Teknologi Informasi (TI). Bank berencana memperluas aksesibilitas terhadap produk dan layanan Bank melalui beberapa *channel* antara lain : Kartu Debit, Layanan SMS Banking, dan *Mobile Banking*. Setelah Bank menjadi BUKU II, sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas terhadap produk dan layanan Bank terhadap nasabah, Bank akan mengembangkan produk dan layanan berbasis internet (*web-based*), seperti *internet Banking*, *online lending* dan lainnya.

Lebih lanjut, Bank juga akan melakukan eksplorasi (penjajakan) untuk melakukan penyertaan pada perusahaan asuransi dan/atau modal ventura. Penyertaan tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi positif pada kinerja dan keberlangsungan usaha Bank. Selain itu, mengingat Bank sudah akan menjadi Bank BUKU II pada akhir tahun 2018, Bank akan mulai merencanakan agar dapat beroperasi aktif sebagai Bank Devisa dengan menerbitkan produk dan/atau aktivitas untuk memfasilitasi nasabah dalam kegiatan lalu lintas devisa.

- **Target Jangka Panjang – Tahun 2020 – 2021**

Strategi Bank untuk jangka panjang adalah melanjutkan pengembangan dari sisi permodalan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia demi mencapai Visi Bank sebagai Bank yang Solid, Sehat dan Modern.

### 3. Langkah-Langkah Strategis yang akan Ditempuh Bank

- **Jangka Pendek**

- a. Menambah setoran modal (*capital injection*) yang diproyeksikan sebesar Rp.500 Milyar sehingga dapat menjadi Bank BUKU II di tahun 2018
- b. Melakukan relokasi Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta.
- c. Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam kegiatan operasional pelaksanaan serta pengembangan produk Kredit Personal Multiguna“Tunaiku”
- d. Ekspansi pertumbuhan kredit SME dengan jaminan (*secured collateral*) yang lebih terfokus
- e. Menambah jaringan kantor baru
- f. Mengembangkan infrastruktur operasional dan transaksional
- g. Pengembangan proses dan sistem internal
- h. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- **Jangka Menengah**

- a. Melakukan investasi dan pengembangan pada Teknologi Informasi
- b. Ekspansi *e-channel*
- c. Perencanaan untuk menjadi Bank Devisa
- d. Penyertaan pada perusahaan Asuransi dan/atau Modal Ventura

- **Jangka Panjang**

- a. Melakukan investasi dan pengembangan pada Teknologi Informasi
- b. Ekspansi *e-channel*

- c. Perencanaan untuk menjadi Bank Devisa
- d. Penyertaan pada perusahaan Asuransi dan/atau Modal Ventura

#### 4. Strategi Pengembangan Bisnis

Dalam rangka mencapai tujuan usaha, Bank menetapkan strategi baik untuk memenuhi target jangka pendek, menengah dan jangka panjang maupun pengembangan bisnis. Strategi yang akan ditempuh oleh Bank adalah sebagai berikut:

- **Strategi Umum**

Bank akan melaksanakan strategi pengembangan bisnis dengan strategi sebagai berikut :

- a. **Bidang Kredit**

Dalam ekspansi kredit, segmen yang akan menjadi prioritas Bank untuk dikembangkan adalah segmen Korporasi (40%), UMKM (40%) dan Retail (20%). Kemudian pada Semester II tahun 2017, seiring dengan membaiknya aktivitas operasional dan *performance* dari Kredit Personal Multiguna Tunaiaku, maka proporsi penyaluran Kredit kepada debitur dalam sektor retail akan ditingkatkan sebesar 10% sehingga menjadi 30%. Dengan demikian proporsi pada akhir tahun 2017 diproyeksikan akan menjadi sebagai berikut : Segmen Korporasi (30%), Segmen UMKM (40%) dan Segmen Retail (30%)

- b. **Bidang Organisasi**

Menyesuaikan Struktur Organisasi yang ada dengan kebutuhan bisnis dan skala usaha Bank dengan tetap memperhatikan prinsip Tata Kelola serta faktor efisiensi dan keseimbangan beban kerja.

- c. **Bidang Teknologi Sistem Informasi**

- Untuk mendukung kegiatan operasional, Bank akan meningkatkan infrastruktur dan pengembangan aplikasi Teknologi Informasi sesuai dengan arah pengembangan bisnis, kebutuhan internal serta disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produk dan jasa pelayanan yang lebih inovatif dalam rangka mewujudkan visi Bank yaitu Bank yang Solid, Sehat dan Modern.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi dari Teknologi Informasi dalam pengendalian internal Bank

- Mempersiapkan Kartu Debit, Layanan *SMS Banking*, dan Layanan *Mobile Banking*. Setelah menjadi BUKU II, Bank juga berencana untuk mempersiapkan Layanan *Internet Banking* dan produk/layanan lainnya.

d. **Bidang Sumber Daya Manusia**

Bank melakukan perekrutan pegawai-pegawai yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan juga melakukan perbaikan sistem untuk mempertahankan pegawai-pegawai tersebut

e. **Strategi mengantisipasi Perubahan Kondisi Eksternal**

Untuk menghadapi beberapa perubahan kondisi eksternal yang menyangkut kelangsungan usaha, Bank secara konsisten melakukan pemantauan terutama menyangkut perubahan pasar, baik untuk keperluan pengendalian risiko maupun untuk memperoleh kesempatan dari setiap perubahan yang terjadi. Bank akan selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan dengan memperkuat fundamental Tingkat Kesehatan Bank, baik menyangkut Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas maupun Permodalan

• **Strategi Khusus**

Secara khusus, Bank telah menetapkan beberapa strategi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

a. **Jangka Pendek**

- Menambah setoran modal (*capital injection*) yang diproyeksikan sebesar Rp.500 Milyar sehingga dapat menjadi Bank BUKU II di tahun 2018
- Melakukan relokasi Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta
- Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam kegiatan operasional, pelaksanaan serta pengembangan produk Kredit Personal Multiguna "Tunaiku"
- Ekspansi pertumbuhan kredit SME dengan jaminan (*secured collateral*) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Menambah jaringan kantor Bank berupa Kantor Kas di Jakarta.
- Mengembangkan infrastruktur operasional dan transaksional.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## b. Jangka Menengah

- Melakukan investasi dan pengembangan pada Teknologi Informasi
- Ekspansi *e-channel*
- Perencanaan untuk menjadi Bank Devisa
- Penyertaan pada Perusahaan Asuransi dan/atau Modal Ventura

## a. Jangka Panjang

Melanjutkan pengembangan dari sisi Permodalan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia menuju visi Bank sebagai Bank yang Solid, Sehat dan Modern.

## G. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan secara tepat waktu, disajikan melalui *Homepage* Bank serta melalui Surat Kabar yang beredar secara Nasional.

## H. INFORMASI LAIN TERKAIT TATA KELOLA BANK

Didalam pengelolaan operasionalnya tidak terdapat intervensi pemilik terhadap manajemen Bank, perselisian intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

## I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai Kepemilikan Saham di Bank Amar Indonesia

Sepanjang tahun 2016, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham Bank, Bank lain, LKBB maupun Perusahaan lain sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Amar	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Bernard RKK Tan	Komisaris Utama	0	0	0	0
Bastian Purnama	Komisaris Independen	0	0	0	0

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Amar	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Gindo Tampubolon	Komisaris Independen	0	0	0	0
Tuk Yulianto	Direktur Utama	0	0	0	0
I N mawa	Direktur Kepatuhan	0	0	0	0
Vishal Tulsian	Direktur Bisnis	0	0	0	0

## J. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA PENGURUS SERTA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali Bank, berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen

## K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah melakukan 5 (lima) kali rapat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah diruangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat di implementasikan oleh RUPS sepanjang tahun 2016

## Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
Bernard RKK Tan	5	5	0	100%
Drs.Ec. Bastian Purnama	5	4	0	80%
D r s . E c . G i n d o Tampubolon,Ak	5	5	0	100%

Keterangan : Per tanggal 17 Nopember 2016 Drs.Ec.Bastian Purnama mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen dan diusulkan pengganti yang saat ini sedang proses *fit and proper test*

## L. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Prinsip *Know Your Employee* (KYE) yang telah diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya fraud telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu

menjadi filter terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank, sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. Dalam tahun 2016 tidak terjadi adanya Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (internal fraud) dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## M. PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2016 terdapat 1 (satu) Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	1	0

Pada Bulan April 2016, Bank melakukan penyelesaian hukum melalui Perdamaian dengan Kurator dan telah menyerahkan aset ex AYDA kepada Kurator dengan Akta No.26 tentang Berita Acara Serah Terima yang dibuat oleh Notaris Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., Notaris di Surabaya pada tanggal 25 April 2016.

**N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan

Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**O. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK**

Sepanjang tahun 2016 tidak ada *buy back shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

**P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK.SELAMA PERIODE LAPORAN**



Bank tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat maka selama tahun 2016 Bank melakukan kegiatan CSR berupa



edukasi Pengenalan Produk Perbankan (Ayo ke Bank) dalam bentuk edukasi kepada masyarakat yaitu Pelajar SMP Sunan Ampel Porong-Sidoarjo (tanggal 17 Oktober 2016).

## **Q. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

### **1. Kebijakan Remunerasi**

Kebijakan remunerasi disusun berdasarkan beberapa hal:

a. Komite Remunerasi

Kebijakan remunerasi ditetapkan berdasarkan kanjian yang dilakukan oleh Divisi SDM berkolaborasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi tidak menerima honorarium khusus sebagai anggota Komite Remunerasi karena telah mendapatkan kompensasi dalam kapasitas jabatan utamanya sebagai Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif Bank.

b. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi didasarkan pada:

- latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi;
- pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya; dan
- mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya;

c. cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri;

d. Mengkaitkan Remunerasi dengan risiko yang meliputi:

- jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi;
- kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;
- dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel; dan
- perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada;

e. Mengkaitkan Pengukuran kinerja dengan risiko meliputi:

- Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja;
  - Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu; dan
  - Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi
- f. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi
- Kebijakan mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan , besarnya dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut;
  - Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*)
- g. Bank tidak menggunakan konsultan ekstern terkait kebijakan Remunerasi,
- h. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal; .
- i. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
- bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
  - penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai;
- j. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya;
- k. jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *material risk takers*;
- l. *shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif;
- m. rasio gaji tertinggi dan terendah;
- n. jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- o. jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan;

- p. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;
- q. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun;
- r. rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi:
- Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel;
  - Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
  - bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank
- s. informasi kuantitatif mengenai:
- total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
  - total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan;
  - total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura*)	3	1.516	2	420
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	3	1.150	2	33
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2.666</b>	<b>2</b>	<b>453</b>

Catatan: \*) Diterima secara tunai

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

Dalam Jutaan Rupiah		
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 milyar	-	-
Di atas Rp.1 milyar s/d Rp.2 milyar	-	-
Di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	2	-
Rp.500 juta kebawah	1	2

\*yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun 2016					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Total	2	78	-	-	116	668

## SHARES OPTION YANG DIMILIKI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bank belum memiliki program pemberian insentif bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dengan kriteria tertentu dalam bentuk *shares option*

Keterangan/ nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang diterbitkan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-

Keterangan/ nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang diterbitkan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

## RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai per posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut :

Jenis Rasio	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	<b>12,6 : 1</b>
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	<b>1,1 : 1</b>
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	<b>1 : 1</b>
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	<b>1,02 : 1</b>

## JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN TAHUN 2016

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu ) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1. milyar	-
Diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1. milyar	-
Rp.500 juta ke bawah	-

## RINCIAN JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN

<b>A. Remunerasi yang bersifat Tetap*)</b>	
Tunai	<b>Rp -</b>
Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank	<b>Rp -</b>
<b>B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</b>	

	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai		
Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank		

Keterangan : \*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah.

## INFORMASI KUANTITATIF

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*)	Sisa yang masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)				
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				

Keterangan : \*) hanya untuk MRT

## KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* POSISI 31 DESEMBER 2016

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola. Untuk periode 31 Desember 2016 hasil *self assessment* penerapan Tata kelola Bank pada Peringkat Komposit 3 (tiga) yang mencerminkan bahwa Manajemen Bank Amar Indonesia telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

Penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi Bank dalam Penerapan Tata Kelola dengan hasil Peringkat sebagaimana tabel berikut :

No	Aspek yang Dinilai	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposure)	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Penerapan Tata Kelola	2
11	Rencana Strategis Bank	3
<b>Nilai Komposit</b>		<b>3</b>
		<b>Cukup Baik</b>

Kesimpulan atas penilaian Penerapan Tata Kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur atas *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jumlah, Komposisi Direksi tahun 2016 dapat dipenuhi, namun untuk Dewan Komisaris belum terpenuhi, karena pada bulan Nopember 2016 salah satu Komisaris Independen (Drs, Ec, Bastian Purnama) mengajukan pengunduran diri, sehingga jumlah Dewan komisaris untuk saat ini adalah 2 orang. Bank telah mengajukan calon pengganti Pengurus Bank kepada OJK sesuai surat No. 510/DIR/XII/2016 dan No.512/DIR/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan yang terakhir No.024/DIR/I/2017 perihal: Kelengkapan Calon Pengurus PT.Bank Amar Indonesia tanggal 16 Januari 2017.
2. Pembentukan keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK/ Bank Indonesia. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat strategik.

3. Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat. Selama tahun 2016 Pemegang Saham Pengendali (PSP) telah melaksanakan tambahan setoran modal sebesar Rp.100 Milyar pada bulan Maret dan April 2016 dan dengan adanya penambahan ini maka Modal Disetor Bank menjadi sebesar Rp.500 Milyar. PSP akan melakukan tambahan setoran modal kembali (*capital injection*) yang diproyeksikan sebesar Rp.500 Milyar, sehingga dapat menjadi Bank BUKU II di tahun 2018
5. Bank telah menyusun rencana strategis sesuai visi dan misi Bank .
6. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan serta cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Hasil risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk jika terjadi *dissenting opinion* .
9. Bank telah menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



## F. GALERI FOTO



## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

**Nama Bank : PT Bank Amar Indonesia**

**Posisi : 31 Desember 2016**

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola Bank		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>3</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Analisis		
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas Penerapan Tata Kelola Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat 3 (tiga) atau "<b>cukup baik</b>". Kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola Bank secara komprehensif dan terstruktur adalah sebagai berikut :</p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Faktor-faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi dan jumlah Direksi telah memenuhi ketentuan, namun Komposisi dan Jumlah Dewan Komisaris Dewan Komisaris hanya berjumlah 2 (dua) orang sehingga belum memenuhi ketentuan. Pada bulan Nopember 2016 salah satu Komisaris Independen mengajukan pengunduran diri sehingga hal ini berakibat pada komposisi dan jumlah komite-komite tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas Komite-Komite belum efektif. Adapun kelengkapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko masing-masing hanya berjumlah 2 (dua) orang, hal ini belum memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan</li> <li>- Bank telah mempunyai struktur organisasi yang cukup memadai.</li> <li>- Bank telah menyusun rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bank.</li> </ul> </li> </ul>		

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah :
  - Terdapat kelemahan pada aspek *governance structure* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mengingat 1 (satu) diantara 2 (dua) anggota Dewan Komisaris tinggal di Jakarta sedangkan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tinggal di Singapura.
  - Terdapat kelemahan pada aspek *governance structure* pada Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite terutama untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko jumlah anggotanya hanya 2 (dua) orang, hal ini belum memenuhi ketentuan minimal 3 orang sehingga sehingga tugas dan fungsinya tidak maksimal

#### **B. Governance Process**

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
  - Penunjukan dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun untuk jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko perlu segera dilengkapi.
  - Dengan jumlah komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang kurang lengkap, hal ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjadi kurang efektif .
  - Untuk memperbaiki *governance process*, Bank telah menindak lanjuti sebagian besar komitmen kepada OJK dan menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi serta telah menyusun *Action Plan* untuk Kredit Personal Multiguna “Tunaiku” dalam upaya untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik, namun demikian yang masih menjadi *concern* adalah Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya, tercermin dari Bank belum memiliki kebijakan terkait dengan skala gaji.
  - Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan serta tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Bank menunjuk Akutan Publik dan kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK/BI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah :
  - Berdasarkan temuan pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi Juli 2016 *subsequent* bulan September 2016, masih terdapat beberapa temuan berupa pelanggaran, namun untuk posisi 31 Desember 2016 sebagian besar dari temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bank.

#### **C. Governance Outcome**

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
  - Hasil risalah rapat Direksi, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika terjadi *dissenting opinion*.
  - Selama tahun 2016, masih terdapat adanya sanksi oleh OJK karena adanya pelanggaran
  - Bank telah menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - Dengan terpenuhinya *governance structure* dan perbaikan dalam *governance process* maka Kinerja Tata Kelola Bank akan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, hal ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap *governance outcome* yaitu perbaikan pada aspek transparansi dan terpenuhinya harapan Pemangku Kepentingan dan penerapan Tata Kelola Bank secara keseluruhan yang lebih baik.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah :
  - Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah cukup memadai dan sesuai dengan implementasi Pemeriksaan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), namun terdapat prosedur pemeriksaan yang perlu ditambahkan sebagaimana diminta oleh Tim Pengawas OJK dalam hasil pemeriksaan umum Bank Amar Indonesia untuk posisi 31 Juli 2016, *subsequent* bulan September 2016

## **F. INFORMASI LAINNYA**

**1. Aset Bank yang dijaminkan :**

Tidak ada aset Bank yang dijaminkan

**2. Transaksi Penting Lainnya Dalam Jumlah Yang Signifikan :**

Selama kurun waktu tahun 2016 Bank tidak melakukan Transaksi Penting lainnya dalam jumlah yang signifikan

**2. Informasi Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik  
(*Subsequent Event*) :**

Tidak terdapat informasi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik.

## **G. DAFTAR LAMPIRAN :**

**1. INFORMASI KUANTITIF EKSPOSUR RISIKO YANG DIHADAPI BANK (LAMPIRAN 1)**

**2. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT. BANK AMAR INDONESIA TAHUN BUKU 2016 (LAMPIRAN 2)**



## **LAMPIRAN 1**

INFORMASI KUANTITIF EKSPOSUR RISIKO YANG DIHADAPI BANK













	a. Belum jatuh tempo									
	b. Telah jatuh tempo									
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual									
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif									
5	Tagihan yang dihapus buku									

Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>						
1	Pertanian, Perburuhan dan Kehutanan						
2	Perikanan						
3	Pertambangan dan Penggalian						
4	Industri Pengolahan	62,323			5,305	1	
5	Listrik, Gas dan Air						
6	Konstruksi	47,471				3	
7	Perdagangan besar dan eceran	107,772			6,348	87	
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	76					
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi						
10	Perantara keuangan						
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	11,490				1	
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						
13	Jasa pendidikan						
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial						
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1,910					
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga						
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya						
19	Bukan Lapangan Usaha						
20	Lainnya	318,993				3,644	61,207
	<b>Total</b>	<b>550,035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,653</b>	<b>3,736</b>	<b>61,207</b>
	<b>Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya</b>						
1	Pertanian, Perburuhan dan Kehutanan						
2	Perikanan						
3	Pertambangan dan Penggalian						
4	Industri Pengolahan	2,987				3	
5	Listrik, Gas dan Air						
6	Konstruksi	5,328				40	
7	Perdagangan besar dan eceran	33,353				211	

8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1				
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi					
10	Perantara keuangan					
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8,017			51	
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib					
13	Jasa pendidikan					
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial					
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya					
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga					
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya					
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya					
19	Bukan Lapangan Usaha					
20	Lainnya	179,262			14	
	<b>Total</b>	<b>228,948</b>	-	-	<b>319</b>	-

Tabel 2.5.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>						
1	Pertanian, Perburuhan dan Kehutanan						
2	Perikanan						
3	Pertambangan dan Penggalian						
4	Industri Pengolahan						
5	Listrik, Gas dan Air						
6	Konstruksi						
7	Perdagangan besar dan eceran						
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum						
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi						
10	Perantara keuangan						
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan						
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						
13	Jasa pendidikan						
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial						
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya						
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga						
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya						
19	Bukan Lapangan Usaha						
20	Lainnya						
	<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya</b>						
1	Pertanian, Perburuhan dan Kehutanan						
2	Perikanan						
3	Pertambangan dan Penggalian						
4	Industri Pengolahan						

5	Listrik, Gas dan Air						
6	Konstruksi						
7	Perdagangan besar dan eceran						
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum						
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi						
10	Perantara keuangan						
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan						
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						
13	Jasa pendidikan						
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial						
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya						
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga						
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya						
19	Bukan Lapangan Usaha						
20	Lainnya						
	<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo Awal CKPN		356		134
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)				
	2a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	11,653	3,380		222
	2b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan				
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan				
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan				
	<b>Saldo Akhir CKPN</b>	<b>11,653</b>	<b>3,736</b>	<b>-</b>	<b>356</b>

Tabel 2.6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Jutaan rupiah)

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo Awal CKPN				
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)				
	2a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan				
	2b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan				
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan				
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan				
<b>Saldo Akhir CKPN</b>					

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

(dalam Jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan												Tanpa Peringkat	Total		
		Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih														
			Peringkat Jangka Panjang				Peringkat Jangka Pendek										
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA	A+ s.d A	BBB+ s.d BBB	BB+ s.d BB	B+ s.d B	Kurang dari B	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA	A+ s.d A	BBB+ s.d BBB	BB+ s.d BB	B+ s.d B	Kurang dari B	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F-3				
		Moody's	AAa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1+ s.d Baa3	Ba1+ s.d Ba3	B1+ s.d B4	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA(idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
PT. ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA	[Idr]A+ s.d [Idr]A	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB	[Idr]B+ s.d [Idr]B	Kurang dari [Idr]B	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3						
PT. Pemeingkat Efek Indonesia	id AAA	id AA+ s.d id AA	id A+ s.d id A	id BBB+ s.d id BBB	id BB+ s.d id BB	id B+ s.d id B	Kurang dari id B	id A1	id A2	id A3 s.d id A4	Kurang dari id A4						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	Tagihan Kepada Pemerintah													64,818	64,818		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik																
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional																
4	Tagihan Kepada Bank		10,007											113,733	123,740		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal													20,617	20,617		
6	Kredit Beragun Properti Komersial																
7	Kredit Pegawai/Pensiunan																
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel													95,836	95,836		
9	Tagihan Kepada Korporasi		10,040											203,287	213,327		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo													233	233		
11	Aset Lainnya													31,464	31,464		
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)																
	<b>TOTAL</b>		10,040	10,007	-									529,988	550,035		







Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Derivatif

(dalam Jutaan rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan								Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya							
		National Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	National Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun < 5 Tahun	> 5 Tahun						< 1 Tahun	> 1 Tahun < 5 Tahun	> 5 Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BANK SECARA INDIVIDUAL																	
1	Suku Bunga																
2	Nilai Tukar																
3	Lainnya																
	TOTAL																
BANK SECARA KONSOLIDASI																	
1	Suku Bunga																
2	Nilai Tukar																
3	Saham																
4	Emas																
5	Logam selain Emas																
6	Lainnya																
	TOTAL																

Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank secara Individual

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah								
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik								
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional								



















9	Tagihan Kepada Korporasi				
10	Aset Lainnya				
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)				
	<b>Total</b>				

Tabel 5.2.b. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara

Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Nilai Aset Yang Diskuritisasi	Keuntungan(Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Diskuritisasi	Keuntungan(Kerugian) Penjualan
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				
4	Tagihan Kepada Bank				
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6	Kredit Beragun Properti Komersial				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9	Tagihan Kepada Korporasi				
10	Aset Lainnya				
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)				
	<b>Total</b>				

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	64,818			22,557		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank	123,740	24,748	24,748	82,024	4,292	4,292
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	20,617	7,216	7,216	75	30	30

6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	95,836	69,559	69,048	25,375	19,031	18,155
9	Tagihan Kepada Korporasi	213,327	193,128	171,743	9,011	9,011	9,011
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	233	153	153			
11	Aset Lainnya	31,464	33,558	33,558	64,722		25,779
	<b>Total</b>	<b>550,035</b>	<b>328,362</b>	<b>306,466</b>	<b>203,764</b>	<b>32,364</b>	<b>57,267</b>

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Kominmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR		Tagihan Bersih	ATMR	
			sebelum MRK	setelah MRK		sebelum MRK	setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	21,758			12,760		
9	Tagihan Kepada Korporasi	7,768			291		
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
	<b>Total</b>	<b>29,526</b>			<b>13,051</b>		

Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR		Tagihan Bersih	ATMR	
			sebelum MRK	setelah MRK		sebelum MRK	setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						

5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6	Tagihan Kepada Korporasi						
	<b>Total</b>						

Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Jenis Transaksi	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment						
	a. Beban Modal 8% (5 - 15 hari)						
	b. Beban Modal 50% (16 - 30 hari)						
	c. Beban Modal 75% (31 - 45 hari)						
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)						
2	Non-delivery versus payment						
	<b>Total</b>						

Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Jenis Transaksi	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan				
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan				
3	Fasilitas Likuiditas Pendukung yang memenuhi persyaratan				
4	Fasilitas Likuiditas Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan				
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan				
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan				
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum				
	<b>Total</b>				

Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Jenis Transaksi	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Total Eksposur</b>				

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam Jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
<b>TOTAL ATMR RISIKO KREDIT TOTAL</b>		
<b>FAKTOR PENGURANG MODAL</b>		

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan Kepada Korporasi						
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	<b>Total</b>						

Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Kominmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR		Tagihan Bersih	ATMR	
			sebelum MRK	setelah MRK		sebelum MRK	setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan Kepada Korporasi						
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
	<b>Total</b>						

Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR		Tagihan Bersih	ATMR	
			sebelum MRK	setelah MRK		sebelum MRK	setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6	Tagihan Kepada Korporasi						
	<b>Total</b>						



Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Jenis Transaksi	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment						
	a. Beban Modal 8% (5 - 15 hari)						
	b. Beban Modal 50% (16 - 30 hari)						
	c. Beban Modal 75% (31 - 45 hari)						
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)						
2	Non-delivery versus payment						
	<b>Total</b>						

Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Jenis Transaksi	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan				
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan				
3	Fasilitas Likuiditas Pendukung yang memenuhi persyaratan				
4	Fasilitas Likuiditas Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan				
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan				
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan				
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum				
	<b>Total</b>				

Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)

(dalam Jutaan rupiah)

NO	Jenis Transaksi	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Total Eksposur				

Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam Jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT TOTAL		
FAKTOR PENGURANG MODAL		

Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam Jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	161	2013						
	b. Risiko Umum	1688.25	21103						
2	Risiko Nilai Tukar								
3	Risiko Ekuitas *)								
4	Risiko Komoditas *)								
5	Risiko Option								
	<b>Total</b>	<b>1849.25</b>	<b>23116</b>						

\*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Tabel 7.2.a. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara Individual

(dalam Jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
----	--------------	------------------------	-----------------------------------------

		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
2	Risiko Nilai Tukar								
3	Risiko Option								
	<b>Total</b>								

Tabel 7.2.b. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara

Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
2	Risiko Nilai Tukar								
3	Risiko Ekuitas								
4	Risiko Komoditas								
5	Risiko Option								
	<b>Total</b>								

Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual

(dalam Jutaan rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	20,941	3,141	39,264	12,230	1,848	23,101
	<b>Total</b>	<b>20,941</b>	<b>3,141</b>	<b>39,264</b>	<b>12,230</b>	<b>1,848</b>	<b>23,101</b>

(dalam Jutaan rupiah)









